

Simbol Palu dan Eksistensinya dalam Politik Praktis Indonesia Tahun 1955

Ahmad Randi¹, Arditya Prayogi²

¹Universitas Padjadjaran, ²UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
yo_gamers@yahoo.com¹, arditya.prayogi@uingusdur.ac.id²

Abstract

In the history of Indonesia, the workers have played a relatively important role in the course of the nation. At a time when the Indonesian people were fighting for independence, the role of the workers could not be ignored, could not be forgotten. They worked hand in hand with other mass groups to free the Indonesian people from the grip of the colonialists. This article aims to reveal how the existence of workers in the socio-political situation and their involvement in practical politics in Indonesia in 1955. This article was written using the historical method which consists of several stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. In this article, it can be concluded that there are political and economic relations between trade unions and various political elements, especially with political parties. The relationship between the two has different interests where labor unions have economic interests in order to get a living wage, health insurance and oppose arbitrary actions by employers. Meanwhile, political parties make themselves as a forum for channeling labor union voice aspirations and use them as a vote base.

Keywords:

Eksistensi
Buruh
Partai Politik

Abstrak

Dalam sejarah Indonesia, kaum buruh telah memainkan peranan yang relatif penting dalam perjalanan bangsa. Pada saat bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan, peranan kaum buruh tidak bisa diabaikan, tidak bisa dilupakan. Mereka bahu membahu bersama kelompok-kelompok massa yang lainnya untuk membebaskan bangsa Indonesia dari cengkeraman penjajah. Artikel ini bertujuan mengungkapkan bagaimana eksistensi buruh dalam situasi sosial politik dan keterlibatannya dalam politik praktis di Indonesia tahun 1955. Artikel ini ditulis menggunakan metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam artikel ini dapat disimpulkan terdapat hubungan politik dan ekonomi serikat buruh dengan berbagai unsur politik terutama dengan partai-partai politik. Hubungan keduanya memiliki kepentingan yang berbeda dimana serikat-serikat buruh memiliki kepentingan ekonomi agar mendapat upah layak, jaminan kesehatan dan menentang tindakan sewenang-wenang para majikan. Sedangkan, partai-partai politik menjadikan dirinya sebagai wadah penyalur aspirasi suara serikat buruh dan menggunakannya sebagai basis suara.

Corresponding Author:

Arditya Prayogi
UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: arditya.prayogi@uingusdur.ac.id

1. PENDAHULUAN

Gerakan atau perjuangan kaum buruh (yang secara luas sering diidentikkan dengan simbol palu) di Indonesia yang sangat gencar, tentunya tidak dapat dipisahkan dari persoalan ekonomi dan politik yang terjadi. Karena perjuangan kaum buruh khususnya, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia umumnya adalah untuk mencapai kemerdekaan nasional, mencapai perbaikan nasib, dan lebih luas lagi untuk menjamin perdamaian dunia yang abadi. Dalam konteks politik praktis, kaum buruh menjadi salah satu basis kekuatan bagi pengembangan partai-partai politik. Hal ini tampak dengan banyaknya organisasi buruh atau serikat buruh yang bergabung dengan partai-partai politik yang saat itu telah terbentuk, di antaranya Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia yang di bentuk oleh Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Serikat Buruh Islam Indonesia yang di bentuk oleh Masyumi dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada masa sebelum tahun 1950, terbentuk Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Awal pembentukan SOBSI karena adanya cita-cita atau keinginan dari beberapa pimpinan kaum buruh untuk mempersatukan serikat-serikat buruh, yaitu dengan cara melebur serikat-serikat buruh itu dalam satu naungan. Cita-cita itu pada akhirnya terlaksana dengan berdirinya SOBSI pada tanggal 29 November 1946. Federasi ini dipimpin oleh Surjono, Harjono, Assarudin, dan Njono. Karena itu, tanggal tersebut (29 November) merupakan tanggal yang bersejarah bagi perkembangan pergerakan buruh di Indonesia. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia merupakan organisasi buruh yang berhaluan komunis. Tanda bahwa organisasi ini berhaluan komunis adalah terpilihnya tokoh dari Partai Komunis Indonesia, Setiadjid sebagai Ketua Kongres I SOBSI pada 1947. Demikian pula dengan tokoh-tokoh seperti, Achmad Sumadi, Oei Gee Hwat, Hardjono, Maruto Darusman dan lain-lain masuk dalam SOBSI untuk membina buruh-buruh Indonesia (Gie, 2005:86-87).

Pada tanggal 27 November 1948 berdirilah Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) yang dipelopori oleh Mr. Moh. Daljono. Serikat buruh ini terbentuk karena adanya peristiwa Madiun pada 18 September 1948, dimana aktivitas atau pergerakan kaum buruh menjadi vakum dan diliputi kebimbangan. Berkaitan dengan hal tersebut, para pemimpin atau tokoh-tokoh Islam segera menginsyafi bahwa betapa perlunya menghimpun dan memobilisasi kaum buruh yang beragama Islam dalam batas-batas yang diperintahkan oleh ajaran agama mereka. Para tokoh Islam berpendapat bahwa perjuangan kaum buruh pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan alam kebendaan (material). Segala bentuk usaha harus berdasarkan kepercayaan, keimanan, dan keyakinan ajaran agama Islam.

Sebagai serikat buruh yang berlandaskan agama Islam, SBII berada di bawah naungan Partai Masyumi. Pada tahun 1956, ketika SBII dipimpin oleh Mr. Jusuf Wibisono yang juga menjabat sebagai anggota Presidium Masyumi dan pernah menjadi Menteri Keuangan, jumlah anggota SBII diklaim sebanyak 275.000 orang dari berbagai bidang pekerjaan. SBII juga memiliki afiliasi dengan *International Confrence of Free Trade Union* (ICFTU) dan menjalin kerja sama dengan gerakan buruh di negara-negara Islam.

Uraian diatas menjelaskan bahwa fenomena menggabungkan beberapa serikat buruh yang ideologinya sehaluan rupanya tengah populer di kalangan kaum buruh Indonesia pada awal kemerdekaan. Hal serupa ini dilakukan juga oleh HIMBI dan Buruh Demokrat. Kedua organisasi

ini mengadakan kongres pada tanggal 10 Desember 1952 di Surabaya. Hasil yang didapat dari kongres tersebut adalah mereka bersepakat untuk meleburkan diri dan membentuk induk serikat buruh yang kemudian diberi nama Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI), dan selanjutnya berubah nama menjadi Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia. Sesuai dengan waktu pelaksanaan kongres, maka tanggal 10 Desember 1952 ditetapkan sebagai tahun terbentuknya KBKI. Sebelum dilebur menjadi KBKI, HIMBI dan Buruh Demokrat sendiri tidak banyak dikenal di kalangan pergerakan kaum buruh karena kedua organisasi tersebut hanya berkiprah terbatas di kalangan anggota Partai Nasional Indonesia (PNI). Bahkan HIMBI sendiri sejatinya bukan suatu perserikatan buruh, melainkan salah satu seksi (departemen) di tubuh PNI yang sengaja dibentuk pada tanggal 1 September 1951 pada Kongres PNI yang kedua di Madiun.

Perkembangan selanjutnya serikat-serikat buruh di atas menjadi barisan terdepan dalam politik praktis dan segala hal yang terkait seperti melakukan kampanye, menyebarkan ideologi dan menyebarkan visi misi partai yang didukungnya. Manfaat yang di dapat oleh partai adalah suara buruh dalam pemilihan umum menjadi suara bagi partai-partai yang memiliki serikat buruh. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Buruh dan Partai Politik terjalin dengan sangat baik. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika hubungan keduanya ketika mereka saling bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka, dimana buruh menginginkan aspirasinya dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui partai politik dan partai politik menginginkan buruh sebagai basis suara mereka saat terutama dalam politik praktis berupa Pemilihan Umum 1955.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahapan pertama dalam metode sejarah adalah Heuristik. Heuristik adalah tahapan mencari dan menemukan sumber sejarah. Sumber sejarah yang digunakan dalam penyusunan artikel ini utamanya adalah sumber tertulis berupa buku-buku (sejarah) yang dijadikan sebagai referensi (riset kepustakaan). Terdapat cukup banyak buku-buku atau kepustakaan yang relevan dengan penulisan artikel ini. Tahap kedua, yaitu tahapan kritik yang terdiri dari dua macam kritik yaitu kritik ekstern dan intern, dimana sumber-sumber yang telah dikumpulkan sebelumnya, diuji otentisitas dan kredibilitasnya. Setelahnya, tahap ketiga yaitu interpretasi. Tahapan ini berupa proses penafsiran setelah data terkumpul dan dikritik sehingga dapat menghasilkan uraian. Pada tahapan ini fakta-fakta dirangkaikan kedalam satu kesatuan yang utuh. Tahap yang terakhir yaitu historiografi, yang merupakan tahap pemaparan dari hasil interpretasi hingga menjadi suatu tulisan sejarah (Prayogi, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Buruh dan Perjuangan Ekonomi

Gerakan atau perjuangan kaum buruh di Indonesia yang sangat gencar, tentunya tidak dapat dipisahkan dari persoalan ekonomi dan politik yang terjadi. Karena perjuangan kaum buruh khususnya, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia umumnya; adalah untuk mencapai kemerdekaan nasional, mencapai perbaikan nasib, dan lebih luas lagi untuk menjamin perdamaian dunia yang abadi. Sehubungan dengan hal itu, maka sangat relevan jika pada bab ini membahas tentang kondisi ekonomi di Indonesia, baik pada masa kolonial maupun setelah kemerdekaan (pasca kemerdekaan) sebab susunan ekonomi yang dibangun oleh Hindia Belanda sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan.

Pemerintah kolonial Belanda rupanya sangat “alergi” terhadap gerakan kaum buruh, sehingga mereka menekannya dengan berbagai cara. Penekanan atau intimidasi yang dilakukan

oleh pemerintah kolonial itu, dapat terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Perburuhan Hindia Belanda; bahwa sepanjang tahun 1940 hanya terjadi pemogokan buruh di 42 perusahaan di antaranya 30 perusahaan tekstil di Jawa Barat dan hanya diikuti oleh 2.115 buruh, padahal jumlah buruh dari 42 perusahaan itu ada 7.949 orang. Itu berarti, hanya 27% dari jumlah buruh yang melakukan pemogokan. Pemogokan yang terjadi ini pun, tidak menimbulkan kerugian yang berarti bagi para majikan. Mereka hanya mengalami kerugian kehilangan hari kerja selama 32 hari (Cahyono, 2005:24).

Walaupun aksi-aksi kaum buruh secara besar-besaran tidak lagi terjadi akibat dari penekanan-penekanan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, tetapi tindasan terhadap rakyat dan kaum buruh Indonesia tidak mengendur atau tidak melemah. Penindasan terhadap kaum buruh masih terus berlangsung, hal ini antara lain kelihatan dari upah buruh yang sangat rendah dan perlakuan sewenang-wenang dari majikan. Menurut statistik tahun 1940, tercatat bahwa rata-rata upah buruh pabrik gula Rp 0,28,- sehari untuk buruh laki-laki, dan Rp 0,23,- untuk buruh perempuan. Pada tahun yang sama (1940), tercatat pula terdapat 407 kasus pengaduan dari kaum buruh yang mendapat perlakuan kekerasan (pemukulan) dari administratur, asisten-asisten, dan mandor-mandor perkebunan. Akhirnya terjadi penyerangan-penyerangan oleh para buruh perkebunan terhadap pengawas-pengawas perkebunan. Pada tahun 1940, tercatat ada 51 peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh para buruh perkebunan yang menyebabkan 2 orang pengawas perkebunan tewas (Cahyono, 2005:24).

Ketika Indonesia jatuh ke tangan penjajahan Jepang pada tahun 1942, tindakan bangsa Belanda yang kejam terhadap rakyat Indonesia dan kaum buruh dilanjutkan oleh fasisme Jepang dengan lebih kejam lagi. Para buruh dijadikan prajurit ekonomi, tapi pada kenyataannya mereka harus mengerjakan sawah untuk kebutuhan perang. Keadaan buruh yang sebenarnya dalam upah, makanan dan kesehatan, merupakan gambaran kemiskinan. Mereka dikirim ke daerah lain untuk menjadi romusha tanpa mendapatkan upah. Menghadapi perlakuan penjajah Jepang yang sudah sangat di luar batas kemanusiaan itu, seluruh lapisan rakyat Indonesia segera bereaksi keras. Mereka bertekad untuk berjuang bersama-sama guna menggulingkan kekuasaan kolonial dan fasis.

Salah satu puncak dari perlawanan rakyat itu ialah, dengan meletusnya Revolusi Rakyat tahun 1945 yang bertujuan agar Indonesia menjadi negara yang merdeka. Dimana perekonomiannya tidak tergantung kepada luar negeri, dan industri nasional bisa berkembang sehingga kemakmuran dapat tercapai serta kemerdekaan berpolitik terjamin. Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang dan menelan korban jiwa yang banyak, akhirnya bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 (Harijanto, 1989: 29).

Setelah lahirnya Republik Indonesia, pemerintah mulai mengatur masalah buruh yang bekerja di perkebunan dan pabrik yang telah dikuasainya. Pemerintah menyadari pentingnya upah untuk kesejahteraan kaum pekerja. Karena pada masapemerintahan kolonial, mereka mendapat upah rata-rata rendah dan kehidupannya kurang terjamin. (Harijanto, 1989: 30). Pada masa perang merebut kemerdekaan, segenap lapisan masyarakat Indonesia bahu membahu berjuang, baik semasa penjajahan Belanda maupun Jepang. Tidak terkecuali kaum buruh turut terlibat di dalamnya. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, kaum buruh segera bertindak dengan cepat membentuk organisasi-organisasi perjuangan dan bergerak mengambil alih dinas-dinas, jawatan-jawatan, dan perusahaan-perusahaan swasta dari Jepang serta menyatakannya sebagai milik Republik. Usaha ini ternyata berhasil, sekalipun dalam beberapa peristiwa pengambilalihan itu kaum buruh harus “berjibaku” melawan para pengawal Jepang. Tujuan kaum buruh melakukan pengambilalihan dinas-dinas dan perusahaan-perusahaan serupa itu adalah untuk “merealisasikan Proklamasi Kemerdekaan”. Dengan kata lain, segala sesuatu yang berada di bumi

Indonesia dan masih dikuasai oleh Jepang harus berpindah tangan menjadi milik Republik yang notebene telah terbebas dari segala bentuk penjajahan.

b. Buruh dan Perjuangan Politik

Menyaksikan sepak terjang kaum buruh tersebut, para pemimpin serikat buruh segera menyadari bahwa tindakan dan gerakan anggota-anggotanya itu harus dikoordinasikan dan dilakukan sesuai dengan azas-azas gerakan buruh. Untuk membahas masalah tersebut, pada 19 September 1945 sejumlah perwakilan kaum buruh berkumpul di Jakarta. Mereka mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan peranan kaum buruh dalam perjuangan pendirian Republik serta merumuskan azas-azas bagi gerakan buruh sesuai dengan tuntutan zaman baru, zaman pasca kemerdekaan (Tedjasukmana, 2008: 31).

Pada konferensi yang berlangsung di Jakarta itu, para pemimpin serikat buruh sepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang dapat mempersatukan serta mewakili serikat-serikat buruh yang ada dan organisasi-organisasi kaum buruh yang lainnya. Di samping itu, organisasi yang hendak didirikan itu harus berbentuk dan bersifat sebuah organisasi perjuangan atau suatu front kaum buruh. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka organisasi dimaksud pun terbentuk pada tanggal 15 September 1945 dan diberi nama Barisan Buruh Indonesia (BBI). Kemudian BBI meminta Komite Nasional (parlemen sementara Republik) agar mengakui BBI sebagai satu-satunya perwakilan gerakan buruh di Indonesia. Selain itu, BBI pun menuntut Komite Nasional hanya mengakui wakil-wakil yang diangkat oleh BBI (Sandra, 2007:57). Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang menjabat sebagai Menteri Urusan Sosial dalam pemerintahan pertama Republik memberikan dukungan sepenuhnya atas berdirinya BBI, bahkan Mr. Iwa Kusuma Sumantri merestui sepenuhnya ketika BBI berencana hendak melaksanakan kongres buruh pada bulan November 1945 (Tedjasukmana, 2008: 33).

Pada 7 November 1945 kongres besar kaum buruh yang digagas oleh BBI itu akhirnya dapat diselenggarakan di Surakarta, Jawa Tengah, dan dibuka oleh Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Urusan Sosial. Yang menghadiri kongres tersebut tidak saja para delegasi dari cabang-cabang BBI dan serikat-serikat buruh di Jawa, tetapi dihadiri juga oleh delegasi-delegasi serikat-serikat buruh dari Sumatera dan beberapa pulau lainnya (Tedjasukmana, 2008: 33). Dalam kongres, Syamsu Harya Udaya dan kawan-kawan yang merupakan para pemimpin Komite Sentral Barisan Buruh Indonesia mengajukan saran agar BBI menjadi sebuah partai politik dari golongan buruh (pekerja). Saran yang diajukan oleh Syamsu Harya Udaya dan kawan-kawan ini menjadi bahan perdebatan yang sengit di dalam kongres itu. Banyak delegasi yang menentang saran tersebut. Mereka menghendaki agar BBI tetap merupakan organisasi serikat buruh. Guna menengahi perdebatan itu, terjadilah sebuah kompromi bahwa partai politik boleh saja dibentuk, tetapi eksistensi BBI sebagai serikat buruh dan organisasi massa harus tetap dipertahankan. Demikian pula dengan serikat-serikat buruh yang lainnya. Partai politik dari golongan kaum buruh itu akhirnya terbentuk dan dinamai Partai Buruh Indonesia (PBI) dan Syamsu Harya Udaya dipilih sebagai presiden sementara PBI (Tedjasukmana, 2008: 35).

Pada masa itu (di awal-awal kemerdekaan) serikat-serikat buruh masih kurang stabil karena tidak terbentuk dengan baik dan usianya pun lebih muda dari partai-partai politik. Karena itu, serikat-serikat buruh yang masih “berusia muda” itu suka dijadikan sejenis cabang atau satelit oleh partai-partai politik yang usianya sudah “lebih tua”. Partai-partai politik suka memanfaatkan atau memobilisasi serikat-serikat buruh sebagai organisasi-front (barisan depan) untuk membantu partai-partai itu dalam kampanye, menyebarkan ideologi partai dan menyebarkan visi misi partai. Dalam hal ini, serikat-serikat buruh mempunyai kontribusi yang besar dalam memperbesar dan memperluas pengaruh partai-partai politik di tengah-tengah masyarakat. Bahkan Tedjasukmana

(2008:154) mengatakan bahwa terbentuknya atau terciptanya serikat-serikat buruh dan federasi-federasi tertentu merupakan gagasan dan pekerjaan partai-partai politik tertentu.

Kaum komunis yang tergabung dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) telah mengambil prakarsa dalam pembentukan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) pada tahun 1946. Jumlah anggota SOBSI sekitar 60% dari seluruh jumlah buruh yang terorganisir. SOBSI memiliki organisasi yang baik dan paling efisien dari segi administrasi. Awal pembentukan SOBSI karena adanya cita-cita atau keinginan dari beberapa pimpinan kaum buruh untuk mempersatukan serikat-serikat buruh, yaitu dengan cara melebur serikat-serikat buruh itu dalam satu naungan. Cita-cita itu pada akhirnya terlaksana dengan berdirinya SOBSI pada tanggal 29 November 1946. Federasi ini dipimpin oleh Surjono, Harjono, Assarudin, dan Njono. Karena itu, tanggal tersebut (29 November) merupakan tanggal yang bersejarah bagi perkembangan pergerakan buruh di Indonesia. Usaha membentuk satu induk perserikatan buruh untuk seluruh Indonesia pada mulanya hanya sebatas cita-cita dan belum dapat terealisasi dengan sempurna, dan kali ini (29 November 1946) telah menjadi kenyataan.

Lahirnya SOBSI bagi pergerakan buruh di Indonesia berarti satu langkah kemajuan dalam usahanya mencapai konsolidasi. SOBSI dalam perjuangannya akan bekerja sama dengan golongan dan partai yang sehaluan. Mengenai bentuk organisasi diterangkan bahwa “dasar organisasi berwujud demokratis sentralisme, di mana pengurus sentral dalam melakukan kewajibannya harus bertanggung jawab kepada kongres.” (Sandra, 2007:62).

Pada pertengahan bulan Mei 1947, SOBSI menyelenggarakan kongres untuk yang pertama kalinya di Malang, Jawa Timur. Pada kongres tersebut hadir wakil-wakil dari 34 organisasi buruh vertikal dan wakil-wakil SOBSI daerah yang mewakili serikat-serikat buruh horizontal. Hadir juga waktu itu wakil-wakil dari organisasi buruh luar negeri, antara lain Blokzjil dan Henning dari EVC serta Suurhoff dan Vijl Brief dari NVV, kedua-duanya perwakilan dari negeri Belanda. Kemudian wakil dari Australia, Healy dan Ted Roach dari Australia Council of Trade Union dan Waterside Worker Federation. Hadir pula Taharudin sebagai wakil dari Gabungan Buruh Malaya.

Di dalam kongres itu disahkan azas pendirian, program perjuangan, dan bentuk organisasi. Beberapa keputusan yang diambil antara lain: 1) SOBSI masuk menjadi anggota WFTU (*World Federation of Trade Unions*). 2) Menyetujui beleid dari pengurus CB SOBSI mengenai Persetujuan Linggarjati. 3) Menerima politis manifes pemerintah November 1945. 4) Menyerukan kepada kaum buruh pelabuhan Australia, Nederland (Belanda) serta kaum buruh negara-negara lainnya untuk meneruskan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang mengangkut senjata (alat-alat perang) ke Indonesia. Di samping itu, kongres juga mengesahkan adanya 2 program untuk diajukan kepada pemerintah Indonesia tentang program pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Juga dalam kongres itu disetujui bahwa Laskar Buruh Indonesia yang semula berdiri sendiri dimasukkan ke dalam SOBSI menjadi bagian pembelaan. Selesai melaksanakan kongres, langkah pertama yang dikerjakan SOBSI terutama mengadakan konsolidasi ke dalam. Bahkan setelah kongres itu SOBSI mendapat undangan dari WFTU untuk menghadiri sidang umum di Praha, Cekoslowakia. Undangan dari WFTU ini jelas mendapat perhatian yang sangat besar dari pengurus SOBSI dengan pertimbangan bahwa dengan ikut sertanya pada sidang umum, maka suara kaum buruh Indonesia akan dapat didengar di dunia internasional. Untuk menghadiri sidang WFTU di Praha itu, SOBSI mengutus Setiadjud dan Oei Gie Hwat.

Sebagai anggota WFTU, SOBSI boleh dikatakan memegang peranan yang relatif penting, bahkan Njono yang menjabat Sekretaris Umum SOBSI mendapat kepercayaan sebagai Wakil Presiden WFTU. Suasana politik dan peperangan melawan pasukan Belanda pada masa Perang Kemerdekaan ternyata berpengaruh besar pada eksistensi SOBSI sebagai federasi buruh yang boleh dikatakan sangat kuat. Ketika Indonesia dan Belanda menandatangani Persetujuan Renville pada

tahun 1948, di tengah-tengah masyarakat timbul pendapat yang setuju dan menolak terhadap Persetujuan Renville. Perasaan serupa ini menggema pula di kalangan pergerakan buruh, dan hal ini mencapai puncaknya ketika SOBSI mengadakan Rapat Presidium yang ketiga pada 22 Agustus 1948. Pada rapat ini terdapat agenda guna menentukan sikap terhadap Persetujuan Renville. Dalam kaitan ini ada beberapa serikat buruh yang tergabung dalam SOBSI menolak Persetujuan Renville, dan ada beberapa pula yang menyetujui atau menerima. Akibat dari perbedaan pandangan politik ini, ditambah pula dengan terjadinya Peristiwa Madiun pada 18 September 1948 yang dipimpin oleh Muso, maka dari 34 serikat buruh yang menjadi anggota SOBSI, 19 di antaranya menyatakan keluar dari keanggotaan.

c. Simbol Palu dan Eksistensinya dalam Politik Praktis 1955

Peristiwa Madiun (18 September 1948) adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang digerakkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan SOBSI dianggap terlibat dalam bagian peristiwa tersebut. Hal inilah yang dijadikan alasan oleh serikat-serikat buruh yang mengundurkan diri dari SOBSI. Mereka tidak membenarkan SOBSI terlibat dalam peristiwa yang sangat menyedihkan bagi bangsa Indonesia itu. Tindakan SOBSI mereka nilai sebagai tindakan yang dapat menjerumuskan organisasi ke dalam jurang bahaya. Setelah peristiwa yang sangat menggemparkan itu, aktivitas pergerakan buruh sama sekali tidak ada. Waktu itu merupakan saat-saat yang vakum. Pemimpin maupun anggota perserikatan buruh diliputi rasa ketakutan akan tindakan yang akan dijatuhkan oleh pemerintah terhadap mereka (Cahyono, 2005: 28 dan Harijanto, 1989: 81).

Guna memulihkan kevakuman aktivitas kaum buruh itu, Kementerian Perburuhan segera memberikan penerangan dan imbauan bahwa keberadaan serikat-serikat buruh itu sangat besar faedahnya di tiap lapangan pekerjaan. Penerangan dari Kementerian Perburuhan itu disambut oleh kaum buruh dengan perasaan lega, dan mulailah mereka menghidupkan kembali organisasi-organisasi yang telah lama tidak aktif itu. Hal ini turut pula dimanfaatkan untuk kembali mengaktifkan SOBSI. Pada 1951, dibawah pimpinan D.N Aidit, PKI menjalin kedekatan dengan SOBSI. Dalam perjalanannya kemudian, pengaruh komunis sangat mendominasi dan eksklusif di dalam tubuh SOBSI. Ideologi komunis melekat juga didalam tubuh serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengan SOBSI, teristimewa SARBUPRI (Serikat Buruh perkebunan), SBG (Serikat Buruh Gula), SBPP (Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran), SBKA (Serikat Buruh Kereta Api), PERBUM (Persatuan Buruh Minyak), dan SBIM (Serikat Buruh Industri Metal) (Tedjasukmana, 2008: 43). Nantinya, berdasarkan catatan di Kementerian Perburuhan, pada tahun 1956 anggota SOBSI telah mencapai 2.661.970 orang.

Kaum nasionalis yang berada di bawah naungan Partai Nasional Indonesia (PNI) memprakarsai terbentuknya Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI) pada 12 Mei 1953. Tujuan kaum nasionalis membentuk KBKI tiada lain untuk membendung pergerakan dan aktivitas SOBSI yang berideologi komunis yang terus berkembang dan bertambah kuat. Turut pula terbentuk Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) pada 27 November 1948 yang diinisiasi oleh Partai Masyumi. Dengan demikian, ideologi atau paham SBII sebagai serikat buruh umat Islam, berlandaskan pada cita-cita dan ajaran-ajaran Kitab Suci Al-Qur'an yang menyerukan kepada semua orang Muslim untuk hidup dalam perdamaian dan menegakkan keadilan sosial. Seperti halnya kaum sosialis dan nasionalis, tujuan Partai Masyumi membentuk SBII adalah untuk mengimbangi SOBSI yang didominasi kaum komunis. Fakta demikian memberikan gambaran maksud dan tujuan partai-partai politik di Indonesia membentuk serikat-serikat buruh itu. Partai-partai politik memandang serikat-serikat buruh sebagai barisan depan di dalam perjuangan mereka untuk mencapai kekuasaan politik.

Setelah partai-partai politik memprakarsai dan membentuk serikat-serikat buruh sebagai organisasi-front (barisan depan) dari partai-partai itu, tentunya di antara mereka terjadi hubungan-hubungan demi kepentingan bersama. Hubungan serikat-serikat buruh atau federasi dengan partai-partai politik terjadi dalam berbagai bentuk. Mereka saling bekerja sama satu sama lain sebagai dua mitra yang kedudukannya boleh dikatakan setara. Pada umumnya serikat-serikat buruh memiliki karakter tersendiri dalam berpolitik. Mereka menginginkan cita-cita politik, terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, dan memelihara hubungan erat dengan partai-partai politik, tetapi kebanyakan dari mereka tidak menyatakan organisasinya sebagai partai politik, melainkan sebagai organisasi massa (kaum buruh) yang berkeinginan dan bertujuan memperjuangkan perbaikan nasib mereka secara ekonomis serta menuntut perlakuan yang manusiawi dari para majikan. Keinginan-keinginan dan harapan-harapan serikat-serikat buruh itu kemudian dimanfaatkan oleh partai-partai politik. Para pemimpin partai politik melibatkan serikat-serikat buruh guna memperluas dan memperkuat partai-partai yang mereka pimpin.

Disini pula kemudian para pemimpin serikat buruh mulai aktif dalam partai-partai politik, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menjadi tokoh kunci. Tujuan kaum buruh masuk dalam partai politik adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan hidup dan nasib mereka, antara lain mereka ingin upahnya dinaikkan agar dapat hidup dengan layak, adanya jaminan kesehatan dan ingin menghentikan sikap semena-mena majikan. Keinginan kaum buruh tersebut diperkuat oleh pernyataan Soekarno, bahwa jika kaum buruh menginginkan kehidupan yang lebih sejahtera, maka perjuangan kaum buruh harus bersifat ulet dan menghimpun kekuatannya dalam serikat pekerja. Bila ditinjau dari perspektif politik, pernyataan Soekarno itu merupakan sebuah isyarat agar kaum buruh membentuk partai politik, atau setidaknya bergabung ke dalam partai politik (Cahyono, 2005: 32)

Kondisi psikologis kaum buruh yang sering ditindas sering dijadikan momentum oleh partai-partai politik untuk memperoleh dukungan suara pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Bagi partai-partai politik, eksistensi kaum buruh dengan beragam permasalahannya merupakan bahan propaganda guna menarik simpati mereka agar bersedia mendukung partainya. Partai politik yang berpropaganda hendak memperjuangkan dan memperbaiki kehidupan nasib kaum buruh lazimnya akan mendapat simpati yang relatif besar dari kaum buruh. D.N. Aidit misalnya, yang dengan sangat jeli dan cerdas mampu memanfaatkan kondisi psikologis kaum buruh di Indonesia sehingga PKI, partai yang dipimpinya, mendapat perolehan suara yang sangat signifikan dan membuat PKI saat itu menjadi salah satu partai yang berpengaruh relatif kuat dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Posisi PKI menjadi semakin mantap berkat agitasi dan propaganda D.N. Aidit di kalangan kaum buruh dan para petani, sehingga pada Pemilihan Umum tahun 1955 PKI berhasil mengumpulkan enam juta suara pemilih. Saat itu PKI termasuk salah satu dari empat partai besar setelah PNI, Masjumi, dan Nahdlatul Ulama (NU), padahal D.N. Aidit baru secara efektif “berkampanye” buat partai yang dipimpinya sejak tahun 1953, kembalinya dari Moskow, dua tahun menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Namun demikian, PKI tidak berhasil duduk dalam kabinet yang terbentuk setelah pemilihan umum tersebut.

Anggota PKI dalam Organisasi Buruh pada Pemilu 1955

Organisasi Buruh	Jumlah Anggota
Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI)	2.500.000
Barisan Tani Indonesia (BTI)	3.300.000

Sumber: Cahyono, 2005: 27 dan Pelzer, 1991:72

Perolehan Suara partai-partai pemenang Pemilu 1955 secara Nasional

Partai Politik	Suara Parlemen	Suara Konstituante	Suara Buruh dalam Partai
PNI	8.343.653	9.070.218	94.477
Masyumi	7.903.886	7.789.619	275.000
NU	6.995.141	6.989.333	96.000
PKI	6.176.914	6.232.512	2.500.000

Sumber: Feith, 1999: 94-98 dan Cahyono, 2005: 27

Kemenangan PNI, Masyumi, NU, dan PKI pada Pemilu 1955 dikarenakan mereka pandai melancarkan kampanye-kampanye sehingga mendapat dukungan atau simpati yang besar dari masyarakat. Salah satu di antara kelompok-kelompok masyarakat yang sangat potensial dalam memberikan suaranya kepada partai-partai politik adalah kaum buruh. Yang menarik, PKI merupakan dalam konteks ini mampu memaksimalkan eksistensi kaum buruh guna mendukung partainya dalam Pemilu 1955. Jauh-jauh hari sebelum pemilihan umum diselenggarakan, PKI telah mengukuhkan dirinya di desa-desa di kalangan buruh perkebunan dan buruh pertambangan serta sudah mulai memperoleh pijakan di sejumlah daerah di Jawa. SOBSI (Sentral Organisasi Serikat Buruh Indonesia) juga memegang peranan yang amat besar bagi PKI dalam memenangkan Pemilu 1955. Bahkan pada masa kampanye menjelang penyelenggaraan Pemilu 1955 PKI melontarkan semboyan yang berbunyi: “PNI partai priyayi, Masyumi dan NU partai santri, tetapi PKI partai rakyat.” Dengan kata lain, eksistensi kaum buruh merupakan salah satu faktor yang meramaikan percaturan politik di Indonesia, terlebih ketika Pemilu 1955 diselenggarakan

Pada awal abad kedua puluh, simbol ini digunakan secara luas di Eropa, dengan berbagai variasinya, seperti palu dengan sekop atau palu-arit dengan alat bajak, untuk menyimbolkan para pekerja, petani dan kaum buruh secara keseluruhan. Pada tahun 1917, Lenin menyelenggarakan lomba untuk menciptakan lambang Soviet. Desain yang menang adalah lambang palu-arit dengan sebilah pedang. Lenin memutuskan untuk membuang gambar pedang itu karena ia ingin menimbulkan kesan bahwa bangsanya adalah bangsa yang damai.

Kemudian, seniman Moscow Yvgeny Kamzolkin merancang sebuah gambar palu-arit bersilang untuk poster hari buruh pada bulan Mei. Pada tahun 1918, versi ini diadopsi secara resmi oleh Soviet. Tetapi siapakah Kamzolkin ini? Ia bahkan bukanlah seorang komunis, pada kenyataannya ia adalah seorang religius. Simbol palu-arit, pada sejarahnya, tidak dimaksudkan untuk menunjukkan antipati terhadap agama.

Di Indonesia kelahiran PKI juga tidak dipicu oleh menentang agama, melainkan tujuannya adalah berjuang melawan penjajahan Belanda, karena para pendukung komunis percaya bahwa penjajahan tidak bisa dipisahkan dari kapitalisme. Banyak pendiri PKI adalah juga anggota organisasi nasionalis Sarekat Islam. Salah satu dari mereka adalah Haji M. Misbach (1876-1926), yang menyatakan bahwa komunisme dan Islam adalah sejalan. Tentu saja, PKI menggunakan palu-arit sebagai simbol partainya, tetapi penggunaan simbol ini dimaksudkan untuk menekankan dukungan bagi kelas buruh dan penolakan mereka terhadap kapitalisme.

Namun saat ini, simbol palu-arit digunakan untuk menekankan gagasan bahwa PKI adalah kejahatan besar – meskipun partai ini telah dibasmi habis pada tahun 1965-67, saat hampir semua anggotanya dan bahkan mereka yang dianggap simpatisan dibantai dengan sadis. PKI sudah tidak lagi ada, anggota dan simpatisan mereka sudah dihabisi dengan sadis pada tahun 1965-67, tetapi ketakutan akan gerakan dan simbol ini terus berlangsung hingga kini.

Saat perempuan dipaksa memakai baju tertentu, saat buruh digaji secara tidak layak, saat minoritas keagamaan diusir dari rumah-rumah mereka dan saat para petani dipaksa bekerja di

perkebunan-perkebunan yang telah terkontaminasi, reaksi para penguasa dan aparat bisa jauh berbeda. Bisa jadi banyak orang menggelengkan kepala mendengar semua ini, tetapi biasanya mereka akan memalingkan wajah dan terus menjalani kehidupan mereka. Namun, ketika seseorang menggambar alat kerja buruh dan petani (palu-arit), polisi dengan cepat bertindak, media berbondong-bondong meliput dan seluruh masyarakat diseret memasuki histeria massal.

Memang, ketakutan akan hantu PKI di negeri ini jauh lebih besar daripada ketakutan akan masalah yang sudah jelas di depan mata. Kejahatan dan korupsi yang terjadi setiap hari tidak diindahkan, mereka yang telah melakukan pembunuhan massal di berbagai tempat, masih dibiarkan dan bebas berkeliaran- sementara banyak orang begitu sibuk mencari hantu.

4. KESIMPULAN

Kaum buruh di Indonesia yang beraktivitas pasca kemerdekaan (1945-1955) pada awalnya bergerak karena tuntutan ekonomi ketimbang politis. Namun, pada perkembangan selanjutnya, gerakan serikat-serikat buruh di Indonesia senantiasa menjadi sasaran pengaruh politik, terutama soal ideologi. Banyak serikat buruh yang terlibat dalam kegiatan politik secara murni atau berafiliasi dengan partai-partai politik yang sudah berdiri jauh-jauh hari sebelumnya. Para politisi maupun para aktivis partai politik sering melibatkan serikat-serikat buruh dalam aktivitas-aktivitas mereka. Menjelang penyelenggaraan pemilihan umum yang pertama kali di Indonesia, yang diselenggarakan pada 25 September dan 15 Desember 1955, eksistensi kaum buruh (serikat-serikat buruh) benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh partai-partai politik sebagai komoditas politik guna mendapat dukungan dan memperoleh suara yang sebesar-besarnya. Nasib kaum buruh yang berkonotasi penuh keprihatinan, berupah rendah, dan selalu tertindas oleh para majikan senantiasa dijadikan bahan propaganda oleh partai-partai politik dengan maksud mendapatkan simpati dari kaum buruh. Yang paling menarik adalah kemampuan Partai Komunis Indonesia (PKI) di bawah pimpinan D.N. Aidit, yang dengan sangat cerdas mampu menggerakkan SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Indonesia) sebagai mesin politik untuk mendulang suara kaum buruh. Ketika PKI masuk ke dalam kelompok empat besar sebagai partai pemenang pada Pemilihan Umum 1955, maka banyak kalangan yang mengatakan bahwa kemenangan PKI tersebut merupakan hasil dari peran aktif SOBSI.

REFERENSI

- Cahyono, Edi. 2005. *Gerakan Serikat Buruh dari masa ke masa: Jaman Kolonial Hindia Belanda hingga Orde Baru*, Jakarta: Hasta Mitra.
- Feith, Herbert. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Gie, Soe Hok. 2005. *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*. Yogyakarta: Bentang.
- Harijanto, Basuki. 1989. *Pemogokan Sarikat Buruh Perkebunan Indonesia di Jawa Timur 1950*, Depok: Program Studi Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia
- Pelzer, Karl. J. 1991. *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Prayogi, A. (2022). TELAAH KONSEPTUAL PENDEKATAN KUANTITATIF DALAM SEJARAH. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 8(1).
- Prayogi, A., & Darutama, A. (2022). Sikap politik surat kabar fadjar asia: Respon politis atas isu pergerakan nasional 1927-1930. *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 12(2), 154-168.

- Prayogi, A., Fasya, A. A., & Sari, N. H. M. (2022, September). Peran Sejarah Sebagai Ilmu Dalam Pembangunan Berkelanjutan. In *SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin* (Vol. 2, No. 1, pp. 168-175).
- Sapriansa, A., & Prayogi, A. (2022, December). The Dynamics of the Bengkulu Tabot: from Sacred to Profan. In *Proceeding International Conference on Malay Identity* (Vol. 3, pp. 65-74).
- Sandra. 2007. *Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia*, Jakarta: TURC
- Tedjasukmana, Iskandar. 2008. *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia*, Jakarta: TURC.
-